

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon

¹Bella Yuniar Putri DwiKartini, ²Ayuning Budiati, ³Juliannes Cadith

^{1,2,3}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia

Korespondensi : bellayuniar02@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian guna mendeskripsikan bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota cilegon dan juga mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Cilegon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan SWOT. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Hasil penelitian ini yaitu peneliti menemukan alternative strategi baru dengan beberapa Langkah yang dilakukan dengan menentukan kekuatan, dan kelemahan internal dinas koperasi dan UMK serta menentukan peluang dan ancaman eksternal dinas yang kemudian dibuat analisis swot dari hasil kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Peneliti menemukan lima alternatif strategi yang dapat diterapkan, yaitu pengelolaan SDM dengan menggunakan teknologi informasi digital, kolaborasi dengan retail untuk meningkatkan permodalan bagi pelaku usaha, meningkatkan penguatan peran pendamping dalam program pemberdayaan UMKM, Menyusun anggaran untuk program khusus guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital serta memanfaatkan SDM yang tersedia untuk membangun motivasi wirausaha dan sikap konsisten pada pelaku usaha.

Kata kunci: Strategi, Pemberdayaan, Pelaku Usaha

Abstract

The aim of the research is to describe how poverty is overcome through strategies for empowering micro, small and medium enterprises in Cilegon City and also to find out the supporting factors and inhibiting factors of the Cilegon City Cooperative and UMK Department in empowering Micro Enterprises in Cilegon City. The method used in this research is qualitative with data analysis techniques using SWOT. The research location was carried out at the Cilegon City Cooperatives and UMK Department. The results of this research are that the researcher found a new alternative strategy with several steps which were taken by determining the internal strengths and weaknesses of the cooperative and MSE services as well as determining the service's external opportunities and threats and then making a SWOT analysis of the results of the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Researchers found five alternative strategies that can be implemented, namely managing human resources using digital information technology, collaborating with retailers to increase capital for business actors, increasing the strengthening of the role of companions in MSME empowerment programs, preparing budgets for special programs to increase understanding of business actors in using technology. digital and utilize available human resources to build entrepreneurial motivation and consistent attitudes in business actors.

Keyword: Strategy, Empowerment, Business Actors

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menjadi permasalahan serius di negara berkembang, seperti Indonesia. Permasalahan terkait dengan kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi serta yang lainnya. Data jumlah penduduk miskin di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari September 2022 serta

menurun 0,26 juta orang dari Maret 2022. Dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat penurunan angka kemiskinan dari maret 2022 hingga maret 2023. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam menurunkan angka kemiskinan serta telah berhasil dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan tersebut.

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Banten (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
1.	Kab. Pandeglang	120.44	131.43	114.65
2.	Kab. Lebak	120.83	134.75	117.22
3.	Kab. Tangerang	242.16	272.35	270.52
4.	Kab. Serang	74.80	83.09	75.45
5.	Kota Tangerang	118.22	134.24	132.88
6.	Kota Cilegon	16.31	18.89	16.46
7.	Kota Serang	42.24	47.91	42.56
8.	Kota Tangerang	40.99	44.57	44.29
	Provinsi Banten	775.99	867.23	814.02

Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2023

Dari tabel 1 diatas maka dapat diketahui jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dapat dilihat bahwa persentasi penduduk miskin paling banyak berada pada Kabupaten Tangerang yaitu pada tahun 2020 berjumlah 242.16 ribu/jiwa lalu mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 272.35 ribu/jiwa dan mengalami sedikit penurunan Kembali di tahun 2022 walaupun tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 270.52 ribu/jiwa. Kota cilegon menjadi daerah di Provinsi Banten dengan persentasi angka kemiskinan terendah yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah 16.31 ribu/jiwa lalu pada tahun 2021 berjumlah 18.89 ribu/jiwa dan pada tahun 2022 yaitu 16.46 ribu/jiwa.

Permasalahan berkaitan dengan kemiskinan perlu penyelesaian secara bersama-sama, kolaborasi antara pemerintah maupun masyarakat. baik dari pemerintah pusat hingga kelapisan paling bawah yaitu kelurahan maupun RT/RW. Seluruh lapisan masyarakat dan berbagai pihak harus bekerjasama dalam pengentasan kemiskinan. Upaya dalam pengentasan kemiskinan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, adalah kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk megurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Indonesia, 2015). Upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum yang mengatur agar kemiskinan di Indonesia tidak semakin meningkat, antara lain sebagai berikut: (1) UU Nomor 13 Tahun 2011, (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Upaya dalam pengentasan kemiskinan tersebut tertuang juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nas), secara eksplisit terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang kemudian pada setiap provinsi dan kabupaten/kota memiliki wewenang untuk berupaya dalam menangani permasalahan kemiskinan didaerahnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Bentuk keseriusan pemerintah kota cilegon dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya melalui pemberdayaan UMKM dibawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon. Beberapa

bentuk program atau kegiatan tersebut yaitu: pelatihan WUB (WiraUsaha Baru) atau program inkubasi, pembuatan sertifikat halal, sertifikat BPOM, kemitraan dengan retail seperti: hypermart; mayofil; mall of serang, pembuatan NIB, serta pendampingan terhadap pelaku usaha.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternative yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Mengingat strategi UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi sekaligus yang menjadi kelemahan bagi UMKM adalah kurangnya akses informasi khususnya informasi pasar, hal ini yang mengakibatkan rendahnya orintasi pasar dan lemahnya daya saing (Andiny & Nurjannah, 2018).

Telah diatur dalam Undang-undang 1999 pada pasal 33 ayat 4 yang berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal tersebut bahwa UMKM ini merupakan bagian dari ekonomi nasional yang mandiri dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pergerakan roda perekonomian negara.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sejalan dengan pesan konstitusional diatas, pemerintah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapat rendah melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pengembangan ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor UMKM. Saat ini pemerintah berusaha mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya UMKM memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan harus kita akui bahwa UMKM memiliki suatu peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinegara sedang berkembang tapi juga di negara maju. Peran yang sangat penting ini terlihat dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian.

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di perdesaan. Namun pada era saat ini yaitu era globalisasi, peran UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat setiap tahunnya, peningkatan yang signifikan terhadap perkembangan UMKM dalam jumlah unit, penyediaan lapangan kerja maupun jumlah output yang dihasilkan menurut (Fajar & Larasati, 2021). Keberadaan UMKM pada perekonomian Indonesia sangat dominan (Sarfiah et al., 2019). Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada bulan maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto sebesar 61,07 % atau senilai Rp 8.573,89 triliun (Trisnawarman et al., 2021). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) Nasional memiliki peran penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia (KemenkeuRI.go.id, 2021).

UMKM sebagai wujud penerapan spesialisasi keunggulan komparatif dari setiap daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui inisiatif peran pemerintah bersama berbagai lapisan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada yang

bertujuan untuk merancang pembangunan ekonomi yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi (Novita sari, 2022). Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Limanseto, 2022).

Kredibilitas sektor UMKM dalam keberlangsungannya tentu saja tidak lepas dari kendala yang dihadapi UMKM. Pemerintah sebagai yang mempunyai wewenang untuk menjaga keberlangsungan UMKM dalam pembangunan ekonomi, telah menyediakan berbagai bentuk dukungan kepada UMKM berupa kebijakan program maupun solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan UMKM. Contohnya seperti kebijakan yang mendukung UMKM berupa bantuan insentif dan pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan lainnya.

Kemiskinan menurut Bappenas dalam (Putriana, 2012) merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan ataupun laki-laki.

Menurut Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh (Hilmi et al., 2022), kemiskinan adalah ketidakmampuan penuh standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan ataupun non makan. Kemiskinan dapat diukur dengan menyamakan tingkatan konsumsi seorang dengan garis kemiskinan ataupun jumlah rupiah yang dikeluarkan buat konsumsi setiap orang perbulan. Sebaliknya penduduk miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di dasar garis kemiskinan.

2. METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian Kualitatif. Dalam (Creswell, 2014) Menurutnya, Penelitian Kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan arti yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis swot.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Kualitatif ini yaitu studi kasus. Dalam (Creswell, 2014) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupannya nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, pengamatan, wawancara serta dokumen. Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Cilegon serta penelitian juga dilakukan dilapangan yaitu pada pelaku Usaha Mikro Kecil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Teori analisis SWOT oleh Freddy Rangkuti. Analisis SWOT merupakan identifikasi dari berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan juga peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan juga ancaman (*threats*).

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan/organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan berupa (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakness*). Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, perlu diketahui terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFAS).

Strengths (Kekuatan)

Kekuatan merupakan suatu sumber daya yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu perusahaan/ organisasi yang membuat perusahaan/organisasi relatif lebih unggul dibanding yang lainnya. Hasil temuan peneliti di lapangan yaitu Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Cilegon memiliki kekuatan SDM/pegawai yang tercukupi dan juga anggaran yang terpenuhi yang dapat menjadi sumber kekuatan internal Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Dinas koperasi dan UMK seperti halnya organisasi perangkat daerah lain yang dilengkapi dengan dukungan sumber daya manusia (SDM), sumberdaya sarana dan prasarana dan juga dukungan anggaran, dukungan tersebut di maksudkan dengan tujuan untuk menunjang kinerja organisasi agar kinerja dapat berjalan secara optimal. Dalam data nominatif pegawai Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon tahun 2023 terdapat bahwa dinas memiliki pegawai sebanyak 113 yang terdiri atas 31 pegawai ASN dan 82 pegawai non ASN/Honorir. Jabatan struktural maupun fungsional pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon telah tercukupi, sehingga ini menjadi kekuatan dinas dalam menjalankan program kegiatan organisasi. Dengan terisinya setiap jabatan dalam struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon maka dapat mempermudah kinerja dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kota Cilegon.

Anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk merupakan anggaran yang cukup besar diantara program lainnya yang dengan sasaran strategisnya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dalam Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan UMKM yaitu sebesar Rp. 1.876.260.734,- dengan tujuan indikator program yaitu Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan yang juga menyampaikan bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Kota untuk Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon telah tercukupi untuk program pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Cilegon.

Kemudian kekuatan selanjutnya dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon yaitu tersedianya program-program yang mendukung pemberdayaan UMKM yang sudah terancang dalam Rencana Strategi (Resntra). Dalam hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa terdapat salah satu program yang sedang dilaksanakn oleh Dinas, yaitu program inkubasi wirausaha baru. Program inkubasi wirausaha baru (WUB) ini merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha sebagai wahana yang efektif untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan atau *capability*, jejaring dan juga wawasan berusaha. Program ini merupakan salah satu program yang menjadi kekuatan internal sebab pihak dinas telah

memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM di Kota Cilegon dengan adanya program inkubasi yang dapat membantu pelaku UMKM untuk naik kelas.

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon selanjutnya yaitu tersedianya *gallery* untuk memamerkan produk UMKM sebagai sarana pemasaran dan pengenalan produk. Gallery UMKM yang terletak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Cilegon ini merupakan wadah promosi yang diresmikan pada awal tahun 2023 telah membantu para pelaku UMKM dalam mempromosikan sekaligus memperjualbelikan produk usahanya. Hal ini tentu saja menjadi kekuatan Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dalam memberdayakan UMKM di Kota Cilegon yaitu dengan menghadirkan prasarana yang menunjang kegiatan promosi produk olahan pelaku usaha di Kota Cilegon.

Adanya kolaborasi/mitra dengan beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan dengan Perusahaan Ritel sebagai sarana promosi juga menjadi bagian dari kekuatan yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon.

Weakness (Kelemahan)

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/kapabilitas suatu perusahaan/organisasi yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon yaitu adanya proses mutasi/rotasi dalam organisasi terkadang memperlambat proses program. Proses mutasi atau perpindahan pegawai dari instansi satu ke instansi lainnya sebenarnya merupakan salahsatu upaya dalam pengembangan kinerja dan karir pegawai. Berdasarkan pada Peraturan BKN RI Nomor 5 tahun 2019 yaitu tentang Tata cara Pelaksanaan Mutasi, dinyatakan bahwa mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi ASN dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan juga pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Namun jika dilihat dari hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, mutasi menjadi bagian dari kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, hal ini dikarenakan adanya mutasi terkadang memperlambat proses program. Pegawai yang mutasi akan mengalami proses adaptasi lingkungan baru serta mempelajari bidang yang bukan berasal dari latar belakang pendidikannya bagi pegawai yang akan menggantikan posisi yang sebelumnya.

Selanjutnya yaitu kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon yaitu kurangnya sarana transportasi yang menunjang kegiatan promosi dan pengenalan produk UMKM. Kegiatan promosi saat mengikuti *event* masih menggunakan tenda yang harus didirikan ketika hendak menggelar produk-produk olahan UMKM Kota Cilegon untuk dipamerkan dan diperjualbelikan saat bazar pada acara nasional. Namun hal ini tidak mempengaruhi semangat Dinas Koperasi dan UMK dalam membantu para pelaku usaha dalam memamerkan produk usahanya agar terus berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat secara meluas. Kedepannya Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon berharap mendapat dukungan kendaraan UMKM untuk media promosi agar promosi juga dapat dilakukan secara *mobile*.

Oppourtunities (Peluang)

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon memiliki peluang dalam Akses informasi melalui media sosial dan juga website sedulur Cilegon. Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon memiliki akses media sosial seperti *instagram, facebook, whatsApp* yang aktif dalam menginformasikan terkait dengan program yang diberikan oleh Dinas kepada para pelaku UMKM.

Didalam akun *instagram diskopukm.cilegon* tersebut berisikan informasi terkait dengan kegiatan program pemberdayaan UMKM serta bukti kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Akses informasi melalui media sosial ini juga dapat terhubung dengan layanan informasi dan pengaduan masyarakat kepada Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Hal ini menjadi sebuah peluang

yang dimiliki oleh suatu organisasi perangkat daerah karena dapat mendorong efisiensi pemerintahan dan juga mengikuti perkembangan teknologi di zaman digitalisasi saat ini.

Peluang selanjutnya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon yaitu Adanya Pendamping UMKM sebagai bentuk dukungan dari Kecamatan dan Kelurahan dalam pemberdayaan UMKM. Pendamping UMKM yang tersebar di setiap kecamatan maupun kelurahan ini berfungsi sebagai bentuk kerjasama antara pihak Dinas Koperasi dan UMK dengan pihak kecamatan maupun kelurahan dalam hal pemberdayaan UMKM. Kerjasama ini bertujuan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih optimal dan juga tepat sasaran. Pendamping UMKM yang ada di Kecamatan maupun kelurahan ini bertugas melakukan penguatan terhadap pelaku UMKM dalam sosialisasi maupun konsultasi yang akan dijadikan laporan kinerja yang dilaporkan setiap secara berkala kepada pihak Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Adanya pendampingan ini merupakan strategi yang dianggap efektif mampu membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kota Cilegon. Diharapkan dengan adanya pendamping dapat membantu para pelaku usaha agar memiliki legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) dan juga diharapkan agar para pendamping dapat mendorong dalam mempercepat transformasi digital para pelaku usaha dengan *on boarding e-commerce* agar pelaku usaha mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

Selanjutnya yaitu peluang yang dimiliki Dinas adalah Akses pembiayaan atau pemodalan baik perbankan maupun non perbankan untuk pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMK juga telah memfasilitasi pemodalan untuk para pelaku usaha baik dari perbankan maupun nonperbankan. Untuk yang dari perbankan, pihak Dinas telah bekerjasama atau melakukan Mou dengan beberapa bank yaitu bank BNI dan juga BJB. Selain itu juga pelaku usaha dapat meminjam modal usaha melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) karena telah bekerjasama dalam menyalurkan dana bergulir untuk pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dana bergulir yang dikelola oleh UPT. Dana Bergulir ini merupakan dana atau modal pinjaman dari pemerintah yang dapat dipinjam oleh pelaku usaha sesuai dengan kualifikasi usahanya dengan bunga 0% untuk yang masuk kategori perintisan yaitu mendapat pinjam dari 1-3 juta dan untuk kategori penguatan sebesar 3- 5 juta yang kemudian nanti uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan bahan atau peralatan produksi produk UMKM tersebut. Meskipun tanpa bunga dan tanpa agunan, akan tetapi dalam proses pencairan dananya harus dilakukan verifikasi dan juga survei lapangan untuk memastikan usahanya.

Gambar1
Penggunaan Dana Bergulir KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) dari tahun 2021-2023



Sumber: Infografis kinerja Pemerintah Kota Cilegon

Threats (Ancaman)

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan/organisasi. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon memiliki ancaman yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dari pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi digital oleh para pelaku UMKM sangat diperlukan di era digital ini untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam hasil wawancara informan mengatakan bahwa pelaku usaha masih dominan kurang memanfaatkan adanya kemajuan teknologi saat ini. Salahsatu contohnya adalah pelaku usaha yang masih kesulitan dalam pembuatan izin berusaha atau NIB melalui website OSS RBA yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini terjadi karena beberapa pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengisi persyaratan dan dokumen yang harus diisi dalam proses atau tahapan sebelum mencetak NIB yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat sistem OSS RBA.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon telah memberikan sejumlah pelatihan bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan produknya. Mulai dari pelatihan digital marketing, pelatihan design kemasan yang dapat membantu pelaku usaha untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam memasarkan produknya. Dinas Koperasi dan UMK juga telah mengadakan *roadshow* kesetiap kecamatan pada setiap minggu untuk memfasilitasi pembuatan NIB agar produk yang dijualnya menjadi legal dan terdaftar di Pemerintah Pusat. Hal tersebut merupakan salahsatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMK agar tidak ada lagi alasan bagi para pelaku UMK mengalami kesulitan dalam membuat NIB karena segala fasilitas yang diberikan oleh Dinas diberikan tanpa dipungut biaya apapun.

Kemudian, kurangnya sikap konsisten dan rendahnya jiwa wirausaha dari pelaku usaha. Faktor penghambat utama UMKM yang sulit untuk berkembang yaitu bukan pada akses pemodal atau pemasarannya, karena 2(dua) hal tersebut telah difasilitasi semaksimal mungkin oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, akan tetapi yang menjadi faktor penghambat berkembangnya UMKM yaitu pada diri pelaku usaha itu sendiri karena masih memiliki jiwa wirausaha yang cenderung rendah. Jiwa wirausaha yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha yaitu kemampuan yang dapat membaca peluang, lalu merubah hal tersebut menjadi hal yang bernilai dengan memiliki ide yang kreatif serta inovatif. Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon terus berusaha untuk mengembangkan jiwa wirausaha yang masih minim di kalangan pelaku usaha dengan mengadakan pelatihan, pendampingan serta pembinaan terhadap pelaku UMKM.

Faktor ancaman selanjutnya yaitu masih belum meratanya pengetahuan terkait laporan keuangan usaha dari para pelaku usaha. Laporan keuangan bagi pelaku usaha bereperan penting dalam keberlanjutan suatu usaha untuk mengetahui perhitungan modal yang digunakan, keuntungan yang diperoleh serta kerugian yang mungkin dialami oleh pelaku usaha. Tata kelola keuangan bagi pelaku usaha kerap kali terlupakan atau bahkan terabaikan oleh pelaku usaha, padahal jantung dari sebuah usaha yaitu terletak pada keuangannya. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMK melakukan pendampingan secara jemput bola dengan bekerja sama dengan pihak pendamping di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pelatihan pembukuan keuangan sederhana kepada pelaku UMKM.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan segala temuan yang di lapangan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Cilegon untuk mengatasi kemiskinan sudah berjalan dengan baik dan mendukung visi serta misi Kota Cilegon tahun 2021-2026 yaitu dengan Visi Terwujudnya Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat serta dengan Misi ke-4 Kota Cilegon yaitu Mewujudkan kesejahteraan yang

merata dengan Strategi Integrasi Program dan Pendampingan yang berkelanjutan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dengan sasaran Meningkatnya kesempatan kerja.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan strategi Baru dengan beberapa langkah yang dilakukan yaitu menentukan kekuatan dan kelemahan internal Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon serta menentukan peluang dan ancaman eksternal Dinas yang kemudian dibuat Analisis SWOT dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah ditemukan. Dan kemudian peneliti menemukan 5 alternatif strategi yang dapat diterapkan yaitu : Pengelolaan SDM dengan menggunakan teknologi informasi digital , Kolaborasi dengan ritel untuk meningkatkan pemodalannya bagi pelaku usaha, Meningkatkan Penguatan peran pendamping dalam program pemberdayaan UMKM, Menyusun anggaran untuk program khusus guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital serta Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk membangun motivasi wirausaha dan sikap konsisten pada pelaku usaha.

5. SARAN

Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dalam mengatasi ancaman yang ada yaitu dengan memperluas jangkauan agar program yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Hal ini bisa dilakukan dengan jemput bola dengan meningkatkan kerjasama dengan pendamping UMKM di Kecamatan dan kelurahan. Peran partisipasi pendamping UMKM dalam membantu menentukan kebutuhan serta mendata keluhan atau permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM. Lalu kemudian, mengingat peran pendamping sangat diperlukan dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM, maka peran pendamping perlu ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitasnya. Dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan khusus untuk para pendamping dapat meningkatkan kualitas yang dimiliki pendamping dalam menjalankan tugasnya selaku pendamping UMKM. Kemudian, dengan menambah kuantitas pendamping alternatif di setiap kelurahan akan membantu pendamping untuk menyalurkan informasi program kegiatan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andiny, P., & Nurjannah. (2018). Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 31–37.
- [2] Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Zuhri (ed.); Kesatu). PUSTAKA PELAJAR.
- [3] Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). Peran Financial Technology (fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanis (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2), 702–715.
- [4] Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- [5] Limanseto, H. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Siaran Pers.
- [6] Novita sari, A. (2022). Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi melalui Peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9, 184–204.
- [7] Putriana. (2012). *Stratgi Penanggulangan Kmiskinan Melalui Pembrdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Prada.

- [8] Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa Msme The Pillar For conomy. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2).
- [9] Trisnawarman, D., Imam, M. C., Chan, J., & Dayanti, A. (2021). Pembuatan Aplikasi E-commerce Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Warung Bu Dhevi. *Prosiding SENAPENMAS*.